

BAB 1  
PENDAHULUAN



**1.1 Latar Belakang Masalah**

Kegagalan PT Lapindo melakukan eksplorasi gas alam di Porong, Sidoarjo mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan alam dan sosial di sekitar kawasan tersebut. Semburan lumpur yang keluar pertama kali pada tanggal 29 Mei 2006, telah meluluh-lantakkan beberapa desa di kawasan Porong. Tercatat lebih dari 4 desa telah terendam lumpur panas dan satu kompleks perumahan juga terkena dampaknya. Seperti yang terjadi di desa Kalitengah, desa Besuki, desa Pejarakan, desa Siring, desa Kedungbendo, desa Jatirejo dan kompleks Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS) Sidoarjo.

Beberapa komentar para ahli geologi menyatakan bahwa kegagalan PT Lapindo Brantas dalam mengebor gas bumi di Porong Sidoarjo dikarenakan tidak hati-hatinya dalam melaksanakan prosedur pengeboran dan menganalisa kondisi alam yang ada disekitarnya. Sebagian para ahli vulkanologi juga turut memberikan komentar bahwa semburan lumpur panas dan gas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas berdasarkan riset yang pernah dipelajari akan bisa berhenti sendiri setelah 30 tahun berselang. Alhasil peristiwa semburan lumpur panas dan gas di Porong Sidoarjo ini menjadi tragedi mengenaskan bagi kehidupan sosial, ekonomi dan psikologis masyarakat di sekitar bencana menyemburnya lumpur panas dan gas di pengeboran Sumur Banjar Panji 1 yang terletak di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo.

Pendapat di atas jelas menunjukkan bahwa semburan lumpur panas di Porong akan berlangsung lama dan ini akan berakibat lamanya penderitaan masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur panas jika tidak segera ditangani secara baik. Banjir lumpur ini pun telah lama berselang yakni satu setengah tahun. Luberan lumpur panas juga telah membuat semakin luasnya wilayah yang tergenangi lumpur panas, hingga kini telah tercatat lebih dari 4 desa telah terendam lumpur panas dan satu kompleks perumahan juga terkena dampaknya.

Dampak yang paling parah adalah menimpa masyarakat yang terkena langsung luapan lumpur panas. Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mencatat, pada awal meluapnya lumpur sedikitnya 7994 jiwa atau sekitar 2064 keluarga telah kehilangan tempat tinggal, namun kini sedikitnya 9200 jiwa telah mengungsi. Sekitar 6743 diantaranya mengungsi di Pasar Baru Porong yang belum difungsikan. 717 jiwa lainnya memilih mengungsi di Balai Desa Renokenongo karena tak kebagian tempat. Sisanya 534 jiwa yang masih memiliki sedikit uang tabungan memilih mengontrak rumah di tempat lain atau tinggal di rumah sanak famili. Jumlah korban terus bertambah seiring makin meluasnya genangan. Bahkan Walhi mencatat setelah satu tahun setengah sudah tragedi semburan lumpur panas akibat eksplorasi migas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc, hingga kini, belum ada kepastian penanganan untuk menghentikan semburan lumpur panas Lapindo tersebut. Peristiwa ini telah menjadi suatu tragedi kemanusiaan dan kejahatan lingkungan yang sangat serius, terutama ketika semburan lumpur panas ini mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk, dan kawasan industri, termasuk mencemari kualitas air, udara, dan memaksa masyarakat di sekitar wilayah itu bergegas meninggalkan sumber-

sumber penghidupannya. Semburan itu telah menenggelamkan hampir 8 desa seluas 470 hektar. 15 ribuan orang terpaksa kehilangan tempat tinggal. Mereka menumpuk di lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong maupun Balai desa Renokenongo, akibatnya kedua tempat tersebut tidak layak sebagai tempat pengungsian. Bagaimana tidak, jika satu bangunan rumah toko seluas 5x4 meter ditempati tiga keluarga di mana setiap keluarganya terdiri dari sepasang suami istri dan anak-anaknya. Masing-masing keluarga dibatasi gordena, tetapi ada pula yang tidak memakai pembatas.

Aktivitas keluarga maupun pribadi melalui gambaran paragraf sebelumnya, bisa dibayangkan, yakni menjadi terusik dalam waktu seketika. Salah satu warga bahkan mengaku memilih tidur di pos karena mengalah dengan anak istri, namun ada pula yang tidak tahan sehingga memilih pindah ke rumah sanak famili. Seorang ibu muda yang baru melahirkan mengaku lebih repot lagi, ia pun memutuskan untuk pindah ke rumah saudaranya. Selama sebulan di pengungsian, banyak pasangan suami istri pun tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya kendati telah disediakan kamar khusus untuk mereka yang menginginkan.

Hal tersebut masih dari segi keluarga. Siswa yang aktivitas belajarnya terganggu tidaklah sedikit. Sampai saat ini sudah 33 sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga madrasah, yang terendam lumpur panas. Aktivitas belajar dari setidaknya 4452 siswa terganggu, termasuk anak-anak yang akan mengikuti ujian SD, SMP, SMA. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Daniel M Rosyid mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan kebijakan khusus bagi anak-anak korban lumpur panas dengan tidak menjadikan hasil ujian nasional sebagai faktor utama kelulusan anak sekolah korban lumpur panas. Sebagai

gantinya, penentuan kelulusan mereka dilihat dari tugas yang mereka kerjakan sehari-hari, perilaku mereka, dan hasil ujian akhir sekolah.

Segi perekonomian juga ikut terguncang karena terkena dampak lumpur Lapindo. Sedikitnya 25 pabrik tenggelam dan perusahaan bangkrut, buruh dan karyawannya pun serentak kehilangan pekerjaan. Ditambah lagi dengan pekerja di sektor informal yakni usaha kecil menengah juga turut kehilangan lapangan pekerjaan karena sekitar Sebanyak 2.299 usaha mikro kecil dan menengah mati akibat bencana lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 80 persen di antaranya merupakan usaha mikro, tegas Abdul Karim, Kepala Subdinas Bina Usaha Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo(<http://www.kompas.com/ver1/Nusantara/0701/12/112514.htm>).

Ketua Dewan Pemimpin Daerah Organisasi Pengusaha Nasional Kendaraan Bermotor di Jalan (Organda) Jawa Timur HB Mustafa mengatakan, lumpuhnya Jalan Tol Surabaya-Gempol akibat terkena lumpur juga telah mengakibatkan pengusaha angkutan rugi sedikitnya Rp.9 miliar. Tak hanya itu, jalan tol Surabaya-Gempol ruas Sidoarjo terpaksa ditutup. Juga ledakan yang diakibatkan oleh tekanan terhadap pipa gas yang berada di bawah tanggul lumpur setinggi 3 meter, yang berakibat pada hilangnya 7 nyawa dan sejumlah lainnya terluka parah. Dari semburan lumpur tersebut, muncul berbagai masalah yang secara bergantian dialami oleh warga korban, baik langsung maupun tak langsung ([http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/070529\\_petisi\\_lumpindo\\_li/](http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/070529_petisi_lumpindo_li/)).

Kerugian yang dialami sudah mengalami titik nadir bagi penderitaan mereka. Harapan untuk hidup damai dan tenang terkoyak hilang dan pupus hanya

menjadi serpihan mimpi yang tidak pernah terjadi. Penderitaan yang di alami masyarakat yang terkena dampak lumpur panas menyebabkan harta benda, persaudaraan, budaya, dan sejarah kehidupan mereka hilang. Sebuah peradaban masyarakat hilang karena mereka harus hidup dalam kondisi yang berbeda dengan kehidupan yang mereka alami sehari-hari sebelum meluapnya lumpur panas. Kehidupan sosial berubah dan terbentuk kehidupan sosial baru menjadi masyarakat yang mengalami penderitaan fisik/lahir maupun batin/jiwa. Ketidakpastian penyelesaian akibat tarik ulur kepentingan oleh PT Lapindo Brantas menyebabkan banyak masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur panas mengalami gangguan jiwa dari yang ringan hingga berat. Beratnya kehidupan sosial yang membenteng dihadapan menjadi beban pikiran yang seolah tidak mampu diselesaikan.

Menariknya, ketika ditinjau-ulang siapa “korban” semburan lumpur, jawaban yang mengemuka adalah mereka yang rumah dan aset-aset penghidupannya terkubur lumpur panas Lapindo. Padahal, bencana yang belum berhenti ini, membuat rugi di berbagai sektor kehidupan warga korban khususnya, dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Tak sebatas, sektor ekonomi, melainkan juga sektor pendidikan, politik, budaya, sosial, dan religiusitas warga. Terlebih, hingga kini, semburan lumpur panas Lapindo makin parah dan meluas.

Penggantian kepada warga korban semburan lumpur panas Lapindo, tak sebatas kerugian materiil, melainkan kerugian imateriil, mencakup hak-hak dasar rakyat, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sandang, pangan, dan papan yang layak, serta pembenahan ruang sosio-kultural warga korban dan lingkungan hidup yang bersih, aman, dan nyaman. Pada

perkembangannya, dilain pihak pemerintah mengeluarkan PerPres seperti dikutip peneliti dalam sebuah website fraksi PDI Perjuangan, menyebutkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, pasal 15 :

- Ayat 2 : ‘Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh per seratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- Ayat 3 : ‘Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN ([http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php?option=com\\_content&task=view&id=214&Itemid=1](http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=1)).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14/2007 yang berarti membatasi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc. dalam memberikan ganti-rugi kepada warga korban, dengan berpedoman pada peta wilayah korban hingga 22 Maret 2007. Akibatnya, rakyat harus kembali menanggung beban untuk “membantu” PT Lapindo Brantas Inc. Sebab, APBN kembali tersedot guna menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh sebuah perusahaan yang mengeksplorasi gas, dan bukan karena faktor bencana alam.

Usaha berbagai cara dijalani para korban lumpur untuk menuntut hak mereka sebagai korban khususnya yaitu permasalahan ganti rugi. Mereka telah tercatat melakukan mogok makan, menjebol tanggul untuk menarik perhatian sekaligus menyadarkan pihak-pihak yang bersangkutan bahwa mereka adalah

orang-orang yang harus diperhatikan. Tindakan lain yang mereka lakukan adalah demonstrasi. Demonstrasi dilakukan berkali-kali oleh para korban lumpur Lapindo. Mulai dari memblokir jalan di jembatan Porong, demo di depan gedung DPRD, bahkan hingga melakukan perjalanan ke Istana Merdeka untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka sebagai korban. Semua usaha tersebut tetap saja tidak dapat membuat presiden mengabulkan permintaan ganti rugi secara *cash n carry*. Terlebih mereka tidak pernah diajak "berbicara" untuk membahas ganti rugi secara layak bagi korban maupun pihak lain yang menimbulkan lumpur panas tersebut menyembur ke permukaan bumi. Mereka para korban hanya menerima apa adanya keputusan dari pemerintah.

Perusahaan yang disebut-sebut menjadi biang dari keluarnya lumpur panas, seperti pada data Media Center Sidoarjo yaitu PT. Lapindo Brantas Inc hanya mau memberi uang Rp. 500 ribu/KK untuk pindah rumah dan Rp. 300 ribu untuk makan satu bulan/jiwa. Sedangkan Rp. 5 juta per KK untuk mengontrak rumah selama 2 tahun. Para korban telah melakukan banyak usaha untuk membuat PT. Lapindo Brantas menghitung kembali kerugian yang diderita, sehingga mereka berharap nantinya bukan ganti rugi namun ganti untung karena tidak sedikit kerugian yang mereka alami ditambah penderitaan baru yang muncul. Namun pemberian ganti rugi masih tersamarkan. Terlebih para korban telah menemui presiden secara langsung dan salah satu pemilik saham PT Lapindo Brantas Inc. yang juga sekaligus menjadi Menko Kesra yaitu Abu Rizal Bakrie.

Peristiwa semburan lumpur tersebut telah menjadi berita yang tiada henti dikabarkan oleh media massa. Terlebih hingga detik ini pun tidak ada yang dapat

menghentikan lumpur panas keluar dari perut bumi. Sehingga, semua fakta yang berkaitan bisa menjadi berita. Mulai dari lumpur panasnya sendiri, korban, tempat pengungsian hingga perhitungan ganti rugi telah menjadi berita yang hangat dimuat berbagai media massa, baik lokal, regional, nasional dan juga internasional tidak hentinya meliput peristiwa "langka" ini.

Media cetak lokal bahkan memuat berita tersebut dengan memberinya ruang khusus. Didalamnya diulas sedemikian rupa berita-berita yang menginformasikan lumpur Lapindo serta penyelesaian ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo yang setidaknya sangat dinanti oleh dua belas ribu jiwa. Hal tersebut belum juga termasuk korban lain yang juga sempat merasakan kemacetan di jalan Porong karena lumpur tersebut.

McLuhan menyatakan bahwa "media adalah pesan". Media adalah perluasan alat indra manusia. Melalui media pula kita dapat mendapatkan informasi. Informasi tersebut membuat kita mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita ataupun jauh dari keberadaan kita. Maka bukan merupakan suatu hal yang mustahil jika media dikatakan sebagai perpanjangan dari alat indra manusia.

Media terbagi menjadi dua. Media cetak dan media elektronik. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada media cetak lokal. Media cetak sendiri terbitannya dapat menjangkau daerah dimana media cetak tersebut berdomisili (media cetak lokal) atau bahkan mencakup ke seluruh wilayah dalam sebuah negara hingga ke luar negeri sekalipun.

Hasil dalam sebuah penelitian terhadap media cetak menyebutkan media cetak lokal memiliki arti yang strategis dalam kehidupan masyarakat di tempat



media itu diterbitkan. Media massa lokal mempengaruhi ritme kehidupan masyarakat yang bersangkutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta aspek lainnya. Selain itu media massa lokal telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, serta menjadi pesan utama oleh masyarakat dalam berbagai irama kehidupan (dinamika) untuk mengadaptasi berbagai persoalan yang terjadi

Berita dalam media cetak lokal lebih dapat berpengaruh kepada masyarakat setempat. Khususnya masyarakat yang wilayahnya terjangkau oleh media yang bersangkutan. Berita-berita yang ada didalam media tersebut berisi fakta-fakta yang berhubungan dengan daerah sekitarnya. Masyarakat tersebut akan lebih antusias dalam hal ingin mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka terutama yang jaraknya dekat.

Maka media cetak lokal lebih dapat menjadi katalisator informasi antara masyarakat dengan pemerintah, karena surat kabar menyampaikn pesan yang bersifat baru dari pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat juga dapat menyampaikan berbagai kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari yang berkaitan dengan pemerintahan dan pelayanannya. Semuanya dapat dimuat menjadi sebuah berita dalam surat kabar lokal.

Menurut Brian S.Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen, dan Don Ranly dalam *News Reporting and Editing* seperti dikutip AS Haris, sebuah peristiwa menarik untuk ditulis sebagai berita, manakala peristiwa itu memiliki nilai layak berita (*news-value*). Peristiwa masuk kategori layak berita jika memiliki nilai-nilai, seperti keluarbiasaan (*unusualness*), kebaruan (*newsness*), akibat (*impact*), aktual (*timeliness*), kedekatan (*proximity*), informasi (*information*), konflik (*conflict*), orang penting (*prominence*), ketertarikan manusiawi (*human interest*), kejutan (*surprising*), seks (*sex*) (Sumadiria, 2006:80).

Paul De Massenner seperti dikutip AS Haris menyatakan bahwa berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak atau pendengar. Sedangkan, Charnley dan James M. Neal menyatakan berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak. Definisi tersebut menjadikan berita menjadi sesuatu yang memiliki nilai tertentu.

Berita merupakan bagian terpenting dari sebuah media. Peran media dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana *diversion*, pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan, mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi, menurut Peter Berger (1979:13) seperti dikutip Henri, realitas subyektif pelaku interaksi sosial. Atau dengan istilah lain, media massa mampu menanamkan *the pictures in our heads* (istilah Walter Lippman, 1922) seperti dikutip Henri tentang realitas yang terjadi di dunia ini (Subiakto, 2001: 17).

Realitas di dunia ini begitu banyak. Khalayak bisa menganggap hal tersebut penting atau tidak. Tergantung sejauh mana mereka menginginkan berita yang bersangkutan. Jika paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa berita dapat membuat gambaran di kepala khalayak, maka semakin banyak berita yang dikonsumsi masyarakat atau khalayak maka mereka semakin memiliki gambaran tentang apa yang ingin mereka ketahui. Tidak hanya sekedar prasangka, namun sudah ada bukti yakni berupa berita.

Bukti tersebut didapatkan manusia dari sebuah media yang memproduksi berita. Seperti pada paragraf sebelumnya yang mengungkapkan bahwa media merupakan perpanjangan alat indera. Realitas di dunia ini pada umumnya dan realitas di sekitar manusia yang memiliki sebuah media dapat diketahui. Perpanjangan mata dan telinga kita dapat diwakilkan oleh media untuk mengetahui realitas yang ada.

Berita merupakan produk dari media. Sedangkan media menurut Dennis McQuail, seperti dikutip Stephen W. Littlejohn, pernah menyatakan bahwa "media lebih sekedar mekanisme sederhana untuk menyebarluaskan informasi: mereka merupakan organisasi kompleks dan suatu institusi masyarakat sosial penting (dalam Littlejohn, 1996:572).

Pernyataan sebelumnya mengungkapkan bahwa media merupakan organisasi yang kompleks sebagai penyebar luas informasi. Oleh karena itu media juga memiliki kode etik sehingga informasinya tetap dapat dipertanggungjawabkan. Maka, sebuah berita memiliki syarat-syarat tertentu hingga dapat dikatakan sebuah berita dan sekaligus dapat dipercaya kredibilitasnya. Hal tersebut setidaknya membuat khalayak masih mengkonsumsi sebuah berita dari suatu media.

Pencari berita yaitu wartawan, dalam rangka melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, menurut Bill Kovach memiliki kewajiban utama yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri mereka. Agar tugas mulia ini bisa dilakukan wartawan, Bill Kovach menyarankan sembilan hal yang mesti dipegang teguh dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik mereka. Sembilan hal tersebut adalah: (1)

Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. (2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah memenuhi hak mengetahui warga. (3) Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. (4) Para wartawan harus menjaga independensi terhadap sumber berita. (5) Jurnalisme harus berfungsi sebagai pemantau kekuasaan. (6) Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. (7) Jurnalisme harus berupaya membuat hal-hal penting menarik dan relevan. (8) Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional (9) Para praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka (Kovach, 2004:6).

Pers sebagai lembaga kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan. Apalagi bagi pemerintah yang banyak melakukan kesalahan dan ketidakbenaran, kontrol sosial pers terasa sangat pedih dan seringkali menggoyahkan kelangsungan pemerintahannya. Tetapi pemerintah juga mampu mempengaruhi pers dengan cara memasang rambu-rambu berupa peraturan dan perundangan agar pers bisa ditundukkan.

Negara-negara penganut paham demokrasi persnya mengemban fungsi sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat. Pers akan senantiasa menyalak ketika melihat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan fungsi kontrol sosial yang dimilikinya itu, pers bisa disebut sebagai institusi sosial yang tidak pernah tidur. Ia juga senantiasa bersikap independen atau menjaga jarak yang sama terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada.



Fungsi kontrol sosial tersebut membuat pers yang merupakan bagian dari media memuat fakta yang berhubungan dengan kinerja pemerintah. Tidak jarang dari setiap pemberitaannya pers juga memberikan kritikan kepada kinerja pemerintah. Namun pers tidak kebal hukum, jika beritanya mengganggu ketenangan seseorang ataupun organisasi maka ia juga dapat dikenai hukuman.

Media merupakan cermin dari realitas. Cermin realitas yang tetap harus dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Realitas yang ada di sekitar kita bahkan yang tak terjangkau sekalipun oleh fisik kita. Hal tersebut karena media tentu saja memuat berita yang merupakan produk dari sebuah media. Berita tersebut salah satunya berhubungan dengan kinerja pemerintah dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat akibat dari kurang baiknya pelayanan pemerintah kepada rakyatnya misalnya. Media juga mau tidak mau telah memberi wawasan kepada rakyat tentang apa yang terjadi disekitar mereka. Masyarakat menjadi tahu berita meski melalui versi wartawan, namun kinerja pemerintah tetap terpantau.

Berita dapat diibaratkan sebagai nyawa media massa. Sebagai nyawa, tentu saja berita amat menentukan hidup dan matinya sebuah perusahaan media. Begitu pentingnya peranan berita, begitu pentingnya peranan media hingga muncul asumsi bahwa tanpa berita media tak akan berarti apa-apa. Berita bukan saja penting tetapi juga sangat menentukan arah peradaban umat manusia. Begitu besarnya pengaruh yang dilakukan oleh media, hingga dalam tulisannya, Donald Shaw dan Maxwell McComb seperti dikutip Littlejohn, mengatakan bahwa: "...media massa mungkin tidak begitu berhasil dalam menentukan apa yang seharusnya kita pikirkan, tapi sangat berhasil dalam menentukan apa yang harus kita renungkan (Littlejohn, 1995:593).

Hal tersebut dapat membuat kita merenung sejenak tentang yang terjadi di Sidoarjo. Seberapa menderitakah mereka, sebesar apakah kerugian yang dialami, atau mungkin kita sendiri juga merasakan dampak dari lumpur Lapindo. Di sisi lain misalnya, kita bisa mengetahui kinerja badan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan lumpur Lapindo. Semua renungan tersebut bisa didapatkan salah satunya melalui sebuah berita.

Fungsi media sebagai kontrol sosial, pasti akan tercermin dari berita-berita yang ditampilkan oleh media yang bersangkutan. Sebuah fakta atau realita tidak hanya diambil begitu saja oleh seorang wartawan. Seperti dijelaskan di paragraf sebelumnya, bahwa wartawan merupakan bagian dari organisasi yakni media. Media tentu saja memiliki kebijakan dalam memuat sebuah berita hingga layak muat.

Berita layak muat tergantung pada nilai berita yang ada pada fakta yang akan disusun. Sesuai dengan nilai-nilai berita yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Selain itu wartawan dalam memuat berita juga mempertimbangkan sembilan elemen yang disampaikan oleh Bill Kovach. Setidaknya hal tersebut selalu berada dalam benak wartawan untuk menjalankan tugasnya sebagai penulis berita yang juga bagian dari media.

Pers sebagai lembaga, intensitasnya berdiri sendiri. Ia hidup ditengah-tengah masyarakat, tetapi bukan bagian dari masyarakat itu. Ia berada dalam satu negara, tetapi bukan bagian dari pemerintahan negara tersebut. Pers lebih dikenal sebagai "Lembaga Kemasyarakatan" (*Social institution*). Hubungan diantara ketiganya saling mempengaruhi. Pers mempengaruhi masyarakat, tetapi masyarakat juga berpengaruh pada pers. Pers dapat mempengaruhi pemerintah,

namun pemerintah juga berpengaruh terhadap pers. Pers sebagai lembaga kemasyarakatan bisa mempengaruhi masyarakat karena ia bertindak sebagai komunikator massa. Agar dipercaya masyarakat, pers berusaha menyampaikan informasi dengan sesuatu yang baru. Tetapi masyarakat sebagai konsumen pers, sangat selektif dalam memilih informasi. Jika penyajian pers tidak sesuai dengan keinginannya, jangankan dibeli, dibacapun tidak. Minat baca masyarakat terhadap produk pers sangat berpengaruh terhadap kehidupan pers itu sendiri (Djuroto, 2000:5).

Pada paragraf sebelumnya peneliti telah memberi gambaran tentang korban dari kecelakaan mengeksplorasi gas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. Aspek apa saja yang ikut terkoyak akibat keluarnya lumpur Lapindo ini. Kasusnya yang sudah berlangsung lama yakni hampir dua tahun karena lumpur terus menerus keluar, diliput dan dimuat oleh berbagai media. Media cetak lokal bahkan memberikan ruang khusus untuk memuat berita yang berhubungan dengan kasus tersebut. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa beritanya merupakan jenis dari *developing news* dan *continuiting news*. Dimana keduanya merupakan jenis berita yang mengulas suatu fakta dari peristiwa karena peristiwa tersebut dianggap penting untuk terus menerus dibahas, dan dimuat di media. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari nilai berita yang terkandung didalamnya. Sepuluh nilai berita sekaligus terdapat dalam berita penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo. Dilihat dari akibatnya saja sudah mencakup korban yang sedikitnya dua belas ribu jiwa menanti terselesaikannya ganti rugi. Apalagi jika dibahas masalah persyaratan terselesaikannya ganti rugi. Rakyat Indonesia pun tidak ketinggalan harus dan wajib menyumbang melalui APBN.

Hal tersebut diatas membuat peneliti tergerak untuk mengetahui tema berita apa saja yang ada dalam berita penyelesaian ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo. Tema merupakan bagian dari berita. Hal ini berkaitan dengan isi berita yang faktanya terus menerus dimuat untuk membahas fakta lain yang masih berkaitan. Fakta tersebut digunakan untuk mendukung tema yang terus dibahas namun dari sudut pandang yang lain sehingga dapat diketahui perkembangan terbarunya.

Data menyebutkan, hingga saat ini belum semua korban mendapatkan ganti rugi 20% dimuka. Bahkan berkas para korban untuk mendapatkan ganti rugi tercatat hingga 29 September 2007 melebihi waktu yang diberikan presiden yaitu tanggal 14 September ada yang belum selesai sekitar 1300 berkas dari total 12000 berkas. Hal itu berarti ganti rugi sebagian belum tersampaikan kepada korban (sumber: koran Surya tgl 4 September dan 29 September 2007).

Permasalahan ganti rugi korban Lapindo akan menjadi berita yang menarik untuk diteliti. Berita ganti rugi tersebut tidak hanya menyangkut sebesar apa ganti rugi yang diberikan kepada korban, tetapi jika membaca cuplikan berita yang telah dikutip peneliti sebelumnya dapat menyangkut masalah yang kompleks. Mulai dari besarnya ganti rugi yang diberikan kepada korban, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk terwujudnya ganti rugi, jumlah banyaknya korban, proses hukum untuk mengurus syarat-syarat ganti rugi, perhatian pemerintah untuk masalah ganti rugi, dan yang paling penting adalah jumlah korban yang telah menerima ganti rugi mengingat lumpur Lapindo ini telah menyembur tanggal 29 Mei 2006, hal itu berarti satu tahun setengah sudah peristiwa itu berlangsung.



Media yang akan diteliti adalah Surya dan Jawa Pos. Keduanya adalah media cetak lokal yang menurut Robert H. Crawford bahwa berita-berita lokal jarang sekali mencakup separo dari isi setiap koran Indonesia. Namun, sekalipun terbatas dalam volumenya, semua berita-berita lokal yang dimuat oleh koran-koran Indonesia, dianggap cukup penting oleh pembacanya. Dikatakan bahwa berita-berita koran lokal lebih diminati daripada berita-berita negara, nasional atau dunia. Minat ini, menurut Victor J. Danilov, bersumber pada keinginan manusia untuk membaca tentang orang dan tempat yang dikenalnya dan tentang hal-hal yang menyangkut dirinya (Flournoy, 1989: 45).

Sebuah makalah analisis isi menyatakan Surya adalah anak dari Kompas yaitu surat kabar yang pernah diteliti oleh Lembaga Konsumen Media tahun 1999 sebagai media yang paling akurat, memisahkan fakta dan opini, dan dilengkapi dengan data, dibanding media lain. Surya juga memberi ruang khusus yang diberi nama Rubrik Khusus untuk membahas Lumpur Lapindo pada setiap terbitan hari Rabu. Setiap hari surat kabar ini memuat berita seputar kasus tersebut. Surya memberi ruang untuk para korban lumpur Lapindo, tim verifikasi, tim Lapindo sendiri, badan pemerintah untuk memberikan suara mereka terkait dengan berita yang akan diteliti oleh peneliti yaitu fakta tentang penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo.

Jawa Pos yang mengklaim sebagai perusahaan surat kabar yang terbit dari Surabaya juga memberikan liputan tentang kasus lumpur Lapindo. Sebagai surat kabar terbesar dan oplah terbesar pula di Indonesia, surat kabar ini memiliki anak perusahaan sebuah pabrik kertas yaitu PT. Adiprima Sura Printa. Pabrik kertasnya yang tercatat telah mencemari kali Surabaya dan kali Tengah, menjadi poin

tersendiri tentu saja dalam hal pemuatan berita-berita terutama yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan ([http://www.terranel.or.id/tulisandetil.php?id=1868\(181207\)](http://www.terranel.or.id/tulisandetil.php?id=1868(181207))).

Peneliti bermaksud meneliti berita tentang penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo melalui metode analisis isi. Metode ini pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. Kerlinger seperti dikutip Wimmer & Dominick mendefinisikan analisis isi sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, obyektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer, 2000:135). Melalui teknik analisis isi diharapkan apa yang ingin diketahui peneliti dapat terjawab.

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada berita yang memuat tentang penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo. Batas waktunya adalah berita satu bulan sebelum dan sesudah presiden menetapkan batas waktu pembayaran ganti rugi sebesar 20% (14 September 2007) yaitu bulan Agustus 2007 hingga bulan Oktober 2007. Pertimbangannya adalah tanggal 14 September 2007 merupakan batas pembayaran ganti rugi yang ditetapkan oleh presiden sejak dikeluarkannya PerPres no.14 th 2007 yaitu tanggal 22 Maret 2007. Selain itu menurut AS Haris sebuah media massa akan selalu menganggap penting untuk memuat berita yang berhubungan dengan suatu hal yang dianggap memiliki arti tersendiri. Beberapa hari sebelum peristiwa itu akan digelar, maka media akan memuat berita yang berhubungan dengan persiapannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang hendak dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, tema berita apa yang dominan dalam berita penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo di surat kabar Jawa Pos dan Surya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi tema yang mendominasi dalam berita penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo di Surat kabar Surya dan Jawa Pos.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang studi ilmu komunikasi dan memperluas pola berpikir dalam kajian analisis isi kuantitatif terhadap isi surat kabar pada tema tertentu.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan kepada para insan pers pada umumnya dan kepada media massa Jawa Pos dan Surya khususnya dalam melakukan penyusunan terhadap suatu peristiwa terutama faktanya dimuat terus menerus, sehingga berita-berita yang dimuat dapat lebih bermakna dan sesuai dengan pembaca media yang bersangkutan.